

Kebudayaan, Perubahan Sosial, dan Agama dalam Perspektif Antropologi

Kurnia Novianti

Peneliti Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, LIPI

kurnia.novianti@yahoo.com

antrop2010@gmail.com

Abstract

As a discipline, anthropology raised 'culture' as a central concept that is widely discussed. In the process, 'culture' has very interesting dynamics, especially when used as an analytical tool in assessing change and religion issues. This paper argues about the dialectic of culture, change, and religion issues so that can explain the phenomena that observed in our daily lives. Through literatures and observation method, this paper aims to provide a perspective to understand the meaning of a phenomenon that observed and analyzed through the reveal of 'hidden transcript' behind the phenomenon.

Key words: culture, social change, religion, anthropological perspective

Pendahuluan

Kebudayaan, perubahan sosial, dan agama merupakan tiga konsep besar yang menjadi topik-topik pembahasan dalam diskusi-diskusi antropologi. Kebudayaan telah menjadi konsep utama dan salah satu yang paling banyak dibahas dalam perkembangan disiplin ini. Fokus perhatian pada masyarakat atau komunitas yang dalam perjalanan sejarahnya mengalami dinamika yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lain, membawa pembahasan mengenai perubahan menjadi satu hal yang tidak mungkin dihindari. Sementara agama menjadi isu yang juga banyak menghiasi diskusi-diskusi para akademisi/peneliti sosial-budaya, termasuk antropolog sejak perkembangan awal hingga kini. Bahkan

Abstrak

Sebagai sebuah disiplin ilmu, antropologi mengangkat "kebudayaan" sebagai sebuah konsep sentral yang dibahas secara luas. Dalam prosesnya, "kebudayaan" memiliki dinamika yang sangat menarik, khususnya ketika digunakan sebagai sebuah alat analisis dalam menilai isu-isu perubahan sosial dan agama. Tulisan ini memaparkan dialektika isu-isu kebudayaan, perubahan sosial, dan agama untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang diamati dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui metode kepustakaan dan pengamatan, tulisan ini bertujuan untuk memberikan sebuah perspektif dalam memahami arti fenomena yang diamati dan dianalisis melalui pengungkapan "catatan tersembunyi" di belakang fenomena itu.

Kata Kunci: kebudayaan, perubahan sosial, agama, perspektif antropologis

agama menjadi salah satu bahan diskusi yang selalu menarik terutama ketika agama dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan, baik materil maupun immateril.

Untuk memahami keterkaitan antara ketiga konsep besar tersebut, tulisan ini hendak mengargumentasikan bagaimana kebudayaan, perubahan sosial, dan agama saling "berkomunikasi" sehingga dapat menjelaskan fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang teramati dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai alat analisis yang utama, kebudayaan lebih dipahami sebagai sesuatu yang memiliki sifat yang dinamis sehingga dalam prosesnya tidak steril dari perubahan yang berdampak pada modifikasi atau pembentukan kembali (reshape) kebudayaan sebuah masyarakat.

Kebudayaan bahkan memiliki variasi sebagai hasil dari pengalaman dan interpretasi yang beragam manusia atau individu yang menjadi anggota masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Geertz (1973: 35) bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk memodifikasi perilakunya di tempat-tempat yang berbeda sehingga apa yang terlihat belum tentu merupakan dirinya yang sebenarnya. Kondisi ini yang memunculkan konsep-konsep apa itu natural, universal, dan constant di dalam diri manusia.

Dengan demikian, para antropolog yang semula memfokuskan perhatian pada masyarakat-masyarakat yang homogen, bounded, dan dianggap unik sehingga menghasilkan teori-teori antropologi yang memosisikan kebudayaan sebagai pedoman bagi masyarakatnya, seperti dituntut untuk lebih peka terhadap masyarakat-masyarakat yang dalam pengamatan terlihat mengalami perubahan dan menunjukkan dinamika yang beragam. Munculnya fenomena atau gejala tersebut kemudian juga berdampak pada semakin maraknya kritikan terhadap teori-teori antropologi yang melestarikan homogenitas kebudayaan.

Sebagai bagian dari masa kontemporer yang sedang bergerak ini, penulis pun tertarik untuk mempelajari dinamika yang terjadi di masyarakat melalui pengamatan sehari-hari, di mana kebudayaan yang semula penulis bayangkan hanya dimiliki oleh sekelompok masyarakat tertentu dengan ciri atau karakteristik tertentu pula, kini menunjukkan 'wajah' yang lain. Terlebih ketika fenomena globalisasi mulai marak dibicarakan oleh pelbagai kelompok atau komunitas –tidak hanya akademisi tetapi juga masyarakat luas- batas-batas budaya menjadi semakin tidak jelas (blurred). Diskusi akan menjadi lebih menarik ketika kebudayaan tidak hanya dikaitkan

dengan perubahan tetapi juga dengan agama karena di dalamnya isu kekuasaan pun muncul mewarnai dialektika antara ketiganya.

Beberapa Teori tentang Kebudayaan

Melewati abad ke-20, para antropolog membangun ide tentang kebudayaan sebagai teori ilmiah yang berkekuatan/powerful, sulit/sophisticated, dan berpengaruh meskipun sebagai sebuah disiplin, ide ini hanya menempel sebagai pengertian yang bersifat "antiquated" dalam ilmu pengetahuan. Antropologi, sebagai salah satu ilmu sosial yang memfokuskan perhatiannya pada aspek manusia sebagai makhluk sosial/human social dan sistem budaya/cultural system, kemudian menempatkan konsep "kebudayaan/culture" sebagai sentral kajian yang terus mengalami perkembangan.

Teori-teori kebudayaan yang pernah dimunculkan oleh para ahli terdahulu seperti Boas, Durkheim, dan Taylor, lebih membangun ide tentang "...matters that culture addresses". Sementara liberal theory yang dipopulerkan oleh Descartes, Hobbes, dan Locke lebih menitikberatkan pada "...undergird the institutions and practices" dari negara liberal modern dan demokratis. Namun tidak seperti teori liberal, yang menjadikannya sebagai ilmu yang seragam/a unified science, teori kebudayaan/culture theory menjadi respon yang dimunculkan dan berinteraksi langsung dengan temuan-temuan empiris dan masalah-masalah yang ditujukan oleh domain of systemic order it refers to. Culture mengkajinya dalam sistem-sistem simbol yang bervariasi (Boggs, 2004).

Boggs (2004) dalam hal ini lebih menitikberatkan pada culture sebagai sebuah teori karena culture mengabstraksikan dan merepresentasikan prinsip-prinsip yang mengatur/ordering

principle (sistem-sistem simbol) yang diorganisir oleh kumpulan manusia (...the anthropological idea of culture is theory because it abstracts and represents the ordering principle (systems of symbols) of organized human collectives). Lebih lanjut Boggs mengatakan bahwa sistem yang dirujuk oleh teori kebudayaan tidak langsung diturunkan oleh inherent properties yang dimiliki manusia, yang secara variabel terhubung/relevant respects antara satu tradisi kebudayaan dengan yang lain, tetapi melalui sistem-sistem simbol yang bervariasi dan makna yang memberikan bentuk kepada hal yang "nyata/real" dan sistem-sistem bahasa, kekerabatan, pertukaran ekonomi, dan politik yang diperhatikan oleh antropologi.

Sementara konsep kebudayaan dalam pandangan Geertz lebih bersifat semiotic. Ia mengutip pernyataan Max Weber bahwa manusia adalah seekor binatang yang bergantung pada jaringan-jaringan yang dirajut/dipintalnya sendiri. Berdasarkan hal itu, Geertz memaknai kebudayaan sebagai jaringan-jaringan yang terbentuk itu dan analisis yang digunakan untuk menjelaskannya tidak menggunakan penelitian ilmiah untuk mencari hukum tetapi lebih kepada pendekatan interpretif untuk mencari makna yang tersembunyi. Apabila ingin memahami apa itu science, bukan melihat apa teori yang digunakan atau temuan-temuan yang dihasilkan tetapi lebih kepada apa yang dilakukan oleh para peneliti/praktisinya (what the practitioners of it do) (Geertz, 1973: 5).

Kebudayaan dalam pandangan Geertz adalah dokumen yang bergerak, bersifat publik, meskipun bersifat ide/ideational tetapi ia tidak sekedar tersimpan di kepala seseorang, meskipun tidak bersifat fisik, kebudayaan bukanlah entitas yang gaib. Perdebatan yang kemudian muncul diantara para intelektual adalah apakah kebudayaan

itu 'subjektif, atau 'objektif', dan muncul beragam istilah yang menyertainya. Namun yang perlu dilihat adalah perilaku manusia sebagai tindakan simbolis/memunculkan simbol-simbol sehingga muncul pertanyaan apakah kebudayaan dibentuk secara terpola atau merupakan kerangka berpikir, atau kombinasi keduanya (Geertz, 1973: 10). Pada bagian selanjutnya, Geertz kembali menegaskan bahwa kebudayaan adalah struktur makna dari perilaku sebagai konspirasi sinyal, dikatakan juga sebagai fenomena psikologis, karakteristik dari pikiran seseorang, personality, struktur kognitif, dan sebagainya (Geertz, 1973: 12).

Kebudayaan juga tidak bersifat statis/ajeg tetapi dinamis menurut Goodenough (1994). Untuk memahami sebuah kebudayaan, diperlukan pemahaman mengenai bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang diteliti karena bahasa mengantarkan peneliti untuk mengetahui praktek-praktek sehari-hari, nilai-nilai, dan kepercayaan/keyakinan –sebagai komponen dalam kebudayaan- yang dimiliki dan memberikan fungsi bagi masyarakat pemilikinya. Goodenough menambahkan bahwa sebuah teori harus mampu menjelaskan bagaimana kebudayaan dan bahasa berubah-ubah/dinamis dari waktu ke waktu. Ini tidak hanya dipelajari dari perkembangan emosi dan kognitif individu tetapi juga dari interaksi-interaksi sosial antaranggota masyarakat (Goodenough, 1994: 266).

Dengan demikian, teori kebudayaan dapat menjelaskan mengenai kelompok-kelompok sosial dan aktivitas mereka, sebagai bahasan selanjutnya. Salah satu kritik Goodenough mengenai pandangan kebanyakan antropolog adalah keyakinan bahwa kebudayaan dan bahasa bertalian dengan masyarakat atau komunitas secara keseluruhan. Untuk itu, ia menekankan bahwa lebih penting berpikir bahwa komunitas atau

masyarakat memiliki kebudayaan dan bahasa yang selalu diperbarui (dalam istilah Goodenough adalah *makeup*) ketimbang kebudayaan dan bahasa yang seragam (Goodenough, 1994: 266). Dari penjelasan konsep tersebut, sambil merefleksikan pengamatan yang dilakukan selama ini, penulis mencoba memahami bahwa kata 'make up' mengandung makna yang erat dengan proses yang dialami oleh kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan senantiasa mengalami perubahan dalam konteks tempat dan waktu tertentu.

Kebudayaan yang senantiasa diperbarui ini hendaknya tidak dilihat sebagai sesuatu yang bersifat monolitik yang menentukan perilaku masyarakat tetapi sebagai pemahaman dan harapan sebagai variasi dari kegiatan yang mereka lakukan yang menuntun perilaku dan interpretasi mereka. Teori kebudayaan yang dikutip Goodenough dari Geertz lebih menekankan pada interaksi manusia sebagai pembentuk dan pemelihara kebudayaan. Namun Goodenough juga mengingatkan bahwa kebudayaan seharusnya tidak ditempatkan di luar masyarakatnya (Goodenough, 1994: 266-267). Sebuah kebudayaan menurut Goodenough adalah kumpulan pemahaman dari individu-individu anggota masyarakat dimana setiap individu memiliki kecenderungan hubungan sesuai dengan pemahaman bersama dalam kelompoknya. Dengan demikian, teori kebudayaan harus dapat menjelaskan proses-proses yang mengurangi atau menambahkan perbedaan diantara individu pemahaman dan hubungan tersebut (Goodenough, 1994: 267).

Pemikiran penting yang lain berasal dari Geertz (1973), yang menempatkan kebudayaan sebagai sebuah konsep yang berdampak pada konsep tentang manusia. Ia memberikan tiga catatan penting, yaitu pertama, membuang pandangan berurut

mengenai hubungan antara evolusi fisik dan perkembangan kebudayaan untuk mendukung pandangan yang tumpang tindih atau interaktif. Kedua, penemuan bahwa perubahan biologis yang besar hingga menghasilkan manusia modern lepas dari nenek moyangnya berada pada sistem saraf pusat pada otak manusia. Ketiga, kenyataannya manusia dalam istilah secara fisik adalah makhluk yang masih belum lengkap (*an incomplete*) dan belum selesai (*an unfinished*) sehingga manusia harus terus belajar untuk bisa memfungsikan segalanya (Geertz, 1973: 44).

Oleh karena itu, kebudayaan digunakan manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, dengan pelbagai material hasil kebudayaan yang bentuknya beragam yang tentu saja diproduksi oleh manusia sendiri. Termasuk di dalamnya simbol-simbol yang diproduksi, digunakan, dan direproduksi oleh manusia, yang tidak hanya sekedar bentuk-bentuk ekspresi, instrumentalitis, atau keterkaitan-keterkaitan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, maupun sosial sehingga Geertz mengatakan bahwa tanpa manusia, tidak ada kebudayaan, dan tanpa kebudayaan, tidak akan ada manusia (Geertz, 1973: 47).

Dengan kemampuan yang dimilikinya, manusia juga berperan dalam mengubah atau memodifikasi kebudayaan sebagai hasil interaksinya dengan pihak-pihak lain di luar kebudayaannya. Seperti dikatakan oleh Keesing (1994) bahwa manusia di manapun memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam menyikapi dunia "di luar sana"; *embodiedness* ini menjadi model dalam konsepsi budaya dari orientasi ruang, agensi, persepsi, emosi, dan pikiran mereka sehingga tidak dapat dikatakan bahwa kebudayaan berasal dari elaborasi pengalaman yang menuju ke satu arah (yang sama). Sehingga secara

budaya, pencitraan dan pengalaman tiap manusia bervariasi tergantung waktu dan tempatnya (sebagai konteks).

Dalam *critical theory*, Keesing menekankan pada pentingnya perhatian yang lebih luas pada bentuk-bentuk simbolis, komunikasi, dan makna. Analisis budaya harus memerhatikan semua struktur dan makna yang diciptakan dan dilestarikan dari aktivitas manusia sehingga apa yang dibutuhkan antropolog dan peneliti-peneliti ilmu sosial lainnya adalah konsep kebudayaan yang mengategorisasikan cara hidup modern yang kompleks dan komunitas pada skala kecil, di masa lalu dan masa kini. Kesimpulannya, Keesing mengajukan 4 point sebagai kritik dan materi untuk didiskusikan lebih lanjut, yaitu:

- 1) Pandangannya untuk menghindari reifikasi dalam produksi dan reproduksi kebudayaan.
- 2) Konsepsi yang mengasumsikan bahwa tradisi budaya membawa kekuatan ideologis tertentu.
- 3) Asumsi bahwa di dalam setiap komunitas/masyarakat akan selalu ada tradisi-tradisi budaya yang subdominan dan parsial sebagaimana kekuatan hegemoni pada tradisi dominan.
- 4) Tidak dapat diasumsikan bahwa kebudayaan merupakan unit yang terbatas sehingga adanya interpenetrasi, *superimposition*, dan campuran/*pastiche* dapat lebih dipahami (Keesing, 1994).

Konsep Agama dalam Antropologi

Salah satu tokoh besar dalam antropologi yang memusatkan perhatiannya pada kepercayaan praktek-praktek agama sebagai isu utama adalah Victor Turner. Bagian ini hendak

menunjukkan bahwa agama telah menjadi satu isu yang menarik perhatian para antropolog sejak lama. Agama, menurut Turner (1987) sangat terkait dengan keadaan natural emosional dan imajinatif, dan memberikan konsekuensi secara budaya berupa ketidakpastian elemen-elemen pengetahuan, di mana semua agama primitif kemudian dicemooh dan dianggap tidak cerdas. Ia pun menegaskan bahwa isu agama/religi bukanlah isu yang sederhana tetapi isu yang di manapun selalu kaya dan kompleks/rumit sehingga bukan berarti sebuah masyarakat yang perkembangan teknologinya jauh tertinggal dibandingkan masyarakat yang lain, sistem religinya dapat dipahami dengan mudah. Karena menurut Turner, masalahnya tidak terletak pada perbedaan struktur kognitif tetapi pada struktur kognitif identical yang mengartikulasikan keragaman dari pengalaman budaya.

Religi/kepercayaan melalui ritualnya dilihat oleh Turner (1987) sebagai seperangkat sistem simbol yang ada pada sebuah masyarakat (secara implisit) yang menceritakan suatu pengalaman empirik yang nyata sebagai interpretasi asli terhadap kebudayaan mereka sendiri. Dilihat dari prosesnya, (hampir semua) prosesi ritual menceritakan sebuah alur, yang terkadang bergerak maju ataupun bersifat menyerupai lingkaran (*cycle*) sehingga banyak sekali aspek yang ingin digambarkan di dalam ritual tersebut. Seperti halnya kedua upacara yang diteliti oleh Turner, di mana ada aktor-aktor yang berperan, benda-benda yang digunakan, dan seting waktu dan tempat juga kemudian penting untuk diperhatikan. Semua itu dikatakan sebagai simbol-simbol yang –tentu saja– maknanya tidak terlihat secara kasat mata tetapi harus diinterpretasi secara sangat hati-hati. Untuk itu, aspek “*emotional*” dan “*imaginative*” harus dimiliki oleh etnografer karena hanya dengan ikut merasakan dan membayangkan/

memetakan jalan cerita ritual yang berlangsung, ia dapat memahami makna di balik simbol-simbol yang digunakan di dalamnya. Inilah yang disebut dengan aspek "emphatetic" yang Turner tekankan untuk meneliti aspek religi dalam masyarakat.

Sementara dalam *Religion as a Cultural System*, Geertz (1977) mengonsepsikan agama sebagai: 1. Sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku untuk, 2. Menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi dan tahan lama dalam diri manusia dengan, 3. Merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan, 4. Membungkus konsep-konsep ini dengan semacam pancaran faktualitas sehingga, 5. Suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak khas realistis. Sistem-sistem simbol itu merupakan sumber-sumber informasi yang ekstrinsik sehingga tidak seperti gen-gen misalnya, semua itu terletak di luar batas-batas organism individual yaitu dalam dunia intersubjektif dari pemahaman-pemahaman bersama.

Simbol-simbol atau sistem-sistem simbol yang menyebabkan atau mendefinisikan disposisi-disposisi yang kita tetapkan sebagai sesuatu yang bersifat religius dan yang menempatkan disposisi-disposisi itu dalam suatu kerangka kerja kosmik adalah simbol-simbol mengenai hakikat dasariah dari kenyataan bias kabur, dangkal, atau terlalu seringkali bertentangan tetapi agama harus menegaskan sesuatu, kalau agama tidak mau hanya terdiri dari koleksi praktik-praktik yang diterima dan sentimen-sentimen konvensional yang biasanya kita acu sebagai moralisme. Agama di satu sisi menanamkan kekuatan sumber-sumber simbolis kita untuk merumuskan gagasan-gagasan analitis dalam sebuah konsep otoritatif tentang bentuk menyeluruh dari kenyataan, dan di sisi lain agama menanamkan kekuatan

sumber-sumber kita, juga simbolis untuk mengungkapkan emosi-emosi seperti gerak hati, nafsu, sentimen, afeksi, perasaan, di dalam suatu konsep yang serupa tentang suasana umum yang meliputi, dan nada serta sifat yang melekat pada suasana itu (Geertz, 1977).

Bagi antropolog, pentingnya agama terletak pada kemampuannya untuk berlaku; bagi seorang individu atau sebuah kelompok sebagai sumber konsep umum namun jelas tentang dunia, dan hubungan-hubungan di antara keduanya di satu pihak, yaitu model dari segi agama itu, yang tak kurang jelasnya yaitu model untuk segi agama itu. Lebih lanjut, studi antropologis mengenai agama dengan demikian merupakan operasi dua tahap, yaitu pertama, suatu analisis atas sistem makna-makna yang terkandung di dalam simbol-simbol yang meliputi agama tertentu, dan kedua, mengaitkan sistem-sistem ini pada struktur-struktur sosial dan proses-proses psikologis. Hanya bila kita mempunyai sebuah analisis teoritis atas tindakan simbolis yang dapat dibandingkan dengan kepuasan (s sofistikasi) pada apa yang sekarang kita miliki untuk tindakan sosial dan psikologis, kita akan dapat secara efektif menguasai segi-segi kehidupan sosial dan psikologis itu yang di dalamnya agama memainkan sebuah peranan yang menentukan.

Dengan demikian, Geertz (dalam *Ethos, World View, and The Analysis of Sacred Symbol*, 1977) menegaskan bahwa agama tidak pernah merupakan metafisik semata-mata. Namun bukan hanya itu, agama juga tidak dapat dianggap melulu bersifat etik/ethics. Ada dua konsep terkait dengan agama yaitu 'ought' (yang seharusnya ada) yang bersifat sangat memaksa itu dirasakan muncul dari suatu 'is' (yang nyatanya ada) yang bersifat faktual, yang komprehensif, dan dengan cara seperti itu agama mendasari tuntutan-tuntutan tindakan manusia

yang paling spesifik di dalam konteks-konteks eksistensi manusia yang paling umum.

Dua konsep lain yang dikaitkan dengan konsep agama adalah etos dan world view. Etos suatu bangsa adalah sifat, watak, dan kualitas kehidupan mereka, moral, gaya estetis, dan suasana-suasana hati mereka. Etos juga merupakan sikap mendasar terhadap diri mereka sendiri dan dunia yang direfleksikan dalam kehidupan. Sedangkan world view adalah gambaran tentang kenyataan apa adanya, konsep mereka tentang alam, diri, dan masyarakat. World view mengandung gagasan-gagasan yang paling komprehensif mengenai tatanan. Agama, dalam hal ini adalah sebagian usaha untuk membicarakan kumpulan makna umum bagi individu untuk menafsirkan pengalaman dan mengatur tingkah lakunya. Konsep lain yaitu simbol-simbol sakral, yang menghubungkan sebuah ontologi dan kosmologi dengan estetika dan moralitas, di mana kekuatan khususnya berasal dari kemampuan mereka yang dianggap ada untuk mengidentifikasi fakta dengan nilai pada taraf yang paling fundamental untuk memberikan pada sesuatu yang bagaimanapun juga bersifat faktual murni, suatu muatan normatif yang komprehensif (Geertz, 1977).

Dari pemikiran Geertz, hal-hal penting yang perlu dicatat adalah pertama, kekuatan sebuah agama dalam menyangga nilai-nilai sosial kemudian terletak pada kemampuan simbol-simbolnya untuk merumuskan sebuah dunia tempat nilai-nilai itu, dan juga kekuatan-kekuatan yang melawan perwujudan nilai-nilai itu menjadi bahan dasarnya. Agama melukiskan kekuatan imajinasi manusia untuk membangun sebuah gambaran kenyataan. Kedua, kebutuhan akan pendasaran metafisik untuk nilai-nilai tersebut tampaknya sangat bervariasi dalam intensitasnya dari kebudayaan yang satu ke kebudayaan

yang lain dan dari individu yang satu ke individu lainnya namun kecenderungan untuk mengeinginkan sejenis basis faktual tertentu bagi komitmen-komitmen seseorang agaknya secara praktis bersifat universal.

Bila dibandingkan antara pemikiran Turner dan Geertz, Turner menitikberatkan pada bagaimana di dalam struktur, setiap aktor menjalankan perannya sehingga makna di balik simbol yang dianalisis mengarah pada fungsi dari ritual upacara yang dilakukan dalam kehidupan nyata masyarakat yang menjalaninya. Sedangkan pengamatan dan analisis yang dilakukan Geertz lebih bersifat interpretive. Meskipun ada kemiripan antara apa yang dilihat keduanya, yaitu bahwa keyakinan harus ditanamkan terlebih dahulu di benak setiap anggota masyarakat (yang menjadi aktor dalam "drama ritual" tersebut) sehingga fungsi itu kemudian benar-benar bisa dirasakan secara nyata (dalam pandangan masyarakat itu sendiri/native) dalam kehidupannya.

Isu Kekuasaan dalam Diskusi tentang Kebudayaan, Perubahan Sosial, dan Agama

Sejumlah kasus yang mengandung isu agama banyak bermunculan beberapa tahun belakangan ini. Diantara kasus-kasus tersebut, isu terorisme menjadi salah satu yang paling banyak menghiasi 'ruang diskusi' banyak pihak—baik politisi, ekonom, ahli hubungan internasional, maupun ahli-ahli yang lain—karena telah menjadi isu yang mengglobal. Terlebih ketika terjadi pemboman gedung World Trade Center (WTC) pada tanggal 11 September 2001 yang berdampak pada diskriminasi terhadap orang-orang beragama Islam (Muslim) karena tindakan anarkisme tersebut dinilai identik dengan Islam. Para pelaku atau pengorganisir rencana pemboman yang

menyebabkan jatuhnya korban warga sipil tersebut kemudian dilabel atau distigmatisasi sebagai teroris. Wacana tentang terorisme yang identik dengan orang Islam beraliran keras ini semakin disebarluaskan melalui pemberitaan-pemberitaan di pelbagai media massa, baik elektronik maupun cetak. Dunia seolah-olah memiliki 'musuh' baru yaitu terorisme, yang harus diwaspadai karena jaringannya begitu luas dan serangannya yang tidak pandang bulu.

Sebuah analisis tentang terorisme yang disampaikan oleh Nurhadi (2003) berikut ini menarik karena dapat dianalisis dengan perspektif antropologi kekuasaan.

Ditengah kemunculan kekuatan-kekuatan potensial seperti Islam pada abad 20, kaum kapitalis barat dihadapkan pada persoalan pelik dalam menjaga kelangsungan proses produksi yang sarat dengan kebutuhan minyak bumi. Menurut keterangan Z.A Maulani, mantan KABAKIN, persediaan minyak yang dikuasai mereka atas negara-negara yang dibawah kendali kaum kapitalis barat hanya cukup untuk puluhan tahun lagi. Artinya, ada ancaman yang sangat mendasar bagi kaum kapitalis barat dan kroninya dalam membangun proyek utama mereka, yakni mempertahankan mega proyek kapitalisme dengan proses produksi yang harus terus berjalan. Sehingga, slogan perjuangan mereka adalah "Siapa yang ingin menguasai dunia maka kuasailah minyak".

Kepentingan para penguasa politik formal di negara-negara kapitalis barat untuk melakukan hegemoni terhadap dunia Islam sebagai kekuatan ideologi, dan kepentingan kaum kapitalis penentu terhadap persediaan minyak bumi yang tersimpan di negara-negara Islam atau berpenduduk mayoritas Islam, menyatukan dua spektrum kekuatan yang selama ini terpendam setelah komunisme dianggap hancur.

Bila saja gagasan demokratisasi tidak berkembang pesat seperti sekarang ini, bisa jadi kaum liberalis-kapitalis akan kembali pada wujud aslinya sebagai negara-negara imperialis, dan perang konvensional akan menjadi pilihan bagi mereka karena persenjataan yang memadai. Tetapi, proyek demokratisasi, --yang awalnya hanya upaya melakukan "gencatan senjata' terhadap ancaman komunis dan Islam--, telah menjadi maskot kepopulisan negara-negara barat. Sehingga, mau ditaruh dimana muka mereka bila mereka sendiri yang menghancurkannya ketika proyek demokratisasi ini telah mengalami akseptabilitas yang tinggi ditengah masyarakat internasional. Dan jalan alternatif untuk mewujudkan dua kepentingan yang menyatu dari kaum penguasa politik liberalis-kapitalis dan kaum kapitalis barat, adalah terorisme.

Terorisme yang dimaksud bukan untuk melakukan perlawanan terhadap para penguasa hegemoni mereka atas dunia, karena tidak sulit bagi kaum liberalis-kapitalis untuk menghadapi dunia Islam secara terang-terangan, --bukan dengan cara teror tetapi dengan perang konvensional--, tetapi terorisme diciptakan oleh kaum liberalis-kapitalis sebagai agen bayaran guna menghancurkan sasaran-sasaran yang menjadi simbol kebebasan mereka. Jadi, agen bayaran terorisme itu jadi korban proyek terorisme liberalis-kapitalis, sementara WTC, Bali dan simbol-simbol kebebasan milik mereka sendiri adalah objek yang sengaja dikorbankan untuk mendapatkan kemenangan yang lebih besar, yakni mempertahankan hegemoni dan persediaan minyak bumi bagi kaum liberalis-kapitalis.

Dampak adanya terorisme sekarang ini, di satu sisi telah merugikan citra kaum muslim di mata komunitas dunia, seperti kalangan non-muslim dan kelompok Islam abangan. Di sisi

lain, wacana terorisme yang dilancarkan barat terhadap dunia Islam telah membangkitkan semangat perlawanan terhadap kaum liberalis-kapitalis, yang menganggap teror dalam perspektif teori konspirasi.

Bagi kaum liberalis-kapitalis, kecaman masyarakat internasional terhadap terorisme, yang diidentikan dengan kelompok Islam, menjadi kemenangan tahap awal, setidaknya dalam menciptakan alasan (*justification*) untuk penaklukan secara militer (baca: penjajahan yang terlegalkan) terhadap negara-negara yang diduga menjadi sarang teroris dan pendukung terorisme. Dan, negara-negara yang dimaksud oleh Amerika Serikat sebagai “*dedengkot*” kaum liberalis-kapitalis adalah negara-negara Islam atau berpenduduk mayoritas Islam yang memiliki kekayaan minyak bumi yang sangat besar, seperti Indonesia, Irak, Afghanistan dan negara-negara lain yang memiliki karakteristik yang sama, yang kemungkinan besar akan menjadi sasaran berikutnya.

Beberapa konsep muncul dalam analisis tersebut, diantaranya agen, kekuatan, kepentingan, hegemoni, simbol, dan kelompok-kelompok yang saling berhadapan. Analisis tersebut pun menyebutkan kata Islam sebagai penanda sebuah identitas yang dimiliki oleh suatu kelompok. Meskipun analisis tersebut bukanlah satu-satunya analisis tentang terorisme namun penulis melihat bahwa fenomena terorisme ini memunculkan isu kekuasaan yang sangat menarik. Setiap individu yang terlibat sangat mungkin disebut sebagai agen yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk memengaruhi pihak lain dalam bertindak atau berperilaku. Menurut Foucault (1977), kekuasaan bukan merupakan sebuah benda yang bisa dimiliki, diberikan atau dipindahtangankan. Kekuasaan merupakan suatu strategi yang kompleks dalam suatu masyarakat

dengan mekanisme tertentu. Kekuasaan pada dasarnya dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu dengan yang lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Di sinilah strategi berlangsung di mana-mana. Artinya, dimana terdapat susunan, aturan-aturan, dan sistem-sistem regulasi, serta ada manusia yang saling berhubungan dengan yang lain, maka di situ pula kekuasaan bekerja.

Menurut Foucault (dalam Bertens 2001), kekuasaan mempunyai banyak bentuk dan penerapan dari bentuk-bentuk kekuasaan berbeda-beda berdasarkan setting masing-masing. Kekuasaan juga terdapat pada sejumlah institusi, dan struktur kekuasaan tidak dapat diartikan sebagai struktur yang mantap. Ia justru akan selalu berubah sejalan dengan interaksi yang terjadi secara terus-menerus -- baik berupa perjuangan, perebutan, maupun persaingan -- serta berkembangnya cara berfikir dan perilaku para pelaku. Dengan demikian, kekuasaan pada dasarnya akan selalu dinamis dan menyebar tanpa bisa dilokalisasi, serta meresap dalam seluruh jalinan hubungan sosial (Foucault, 1980). Dari analisis di atas, tidak hanya kelompok liberalis-kapitalis yang memiliki kekuasaan itu tetapi juga kelompok Islam yang melakukan resistensi.

Meminjam pendekatan Gramsci, yang memfokuskan pada bagaimana dan mengapa secara khusus subyek-subyek yang disituasikan memobilisasi untuk menunjukkan penindasan mereka. Inilah pertanyaan yang tidak dielaborasi oleh Foucault. Sebaliknya, Foucault memiliki pemikiran teori tentang bagaimana kekuasaan (*power*) membentuk kondisi-kondisi di mana hidup adalah hidup (*the conditions in which lives are lived*) (Li, 2007: 25). Governmentality merupakan mekanisme berlangsungnya kekuasaan dalam relasi kekuasaan. Artinya, ia bukan

hanya gambaran bagaimana negara mengontrol masyarakat atau bagaimana negara mengendalikan populasi dengan memanipulasi pengetahuan dan kebenaran, atau gambaran mengenai bagaimana populasi dapat menghasilkan praktek yang dikehendaki oleh negara. Governmentality merupakan gambaran tentang mekanisme berlangsungnya kekuasaan dalam setiap relasi sosial sehingga tidak bisa direduksi sebagai manifestasi relasi masyarakat dengan negara. Relasi sosial antar individu juga dapat merefleksikan mekanisme governmentality. Terlebih lagi upaya mengidentifikasi berlangsung tidaknya mekanisme governmentality melalui ada tidaknya perlawanan kelompok subordinat terhadap kelompok dominan merupakan bentuk simplifikasi mekanisme itu.

Sementara Gramsci lebih menggunakan konsep hegemony untuk tujuan ini, dan formulasinya terkenal misterius dan terfragmentasi. Dalam critical review terhadap konsep hegemony Gramsci, Crehan berargumentasi bahwa istilah hegemony merupakan "simply names the problem –bagaimana relasi kekuasaan menjadi dasar dari bentuk-bentuk yang bervariasi dari ketidaksetaraan yang diproduksi dan direproduksi". Gramsci tidak menggunakannya untuk menggambarkan kondisi yang tetap (fixed condition), namun lebih sebagai cara untuk membicarakan "bagaimana kekuasaan hidup dalam rentang waktu dan tempat tertentu", selalu, sebagai perpaduan/campuran dari paksaan (coercion) dan persetujuan/kesepakatan (consent) (Li, 20007: 25).

Kekuasaan-kekuasaan (powers) yang bersifat multipel tidak dapat ditotal dan terlihat mulus. Inilah pengamatan yang sangat penting menurut Li (2007: 25-26). Keberagaman kekuasaan, beragam cara praktik memosisikan orang, cara-

cara yang beragam "playing across another" menghasilkan kesenjangan (gaps) dan pertentangan-pertentangan (contradictions). Para subyek yang terbentuk dari matrik-matrik ini menemui ketidakkonsistenan yang memberikan kemungkinan bagi pandangan yang kritis. Kemudian, kekuatan dirasakan bersifat memencar atau menyebar, atau bahkan tidak dirasakan sebagai kekuasaan sama sekali, dapat menjadi subyek dari kesadaran kritis. Tentu saja, menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja, unsettling truths, dengan demikian dapat diteliti dan dikontestasi sebagaimana agenda politik menurut Foucault maupun Gramsci.

Kekuasaan juga selalu bertautan dengan pengetahuan, sebab manusia ketika melakukan interaksi dengan yang lain akan selalu mengkonstruksi, mendekonstruksi, dan merekonstruksi pengetahuannya (Foucault, 2000). Pengetahuan itu berasal dari relasi-relasi kekuasaan yang menandai keberadaan subjek (Foucault, 1980). Dengan demikian, kekuasaan dan pengetahuan merupakan dua sisi yang bekerja dalam proses yang sama. Kekuasaan selain membentuk pengetahuan, juga memproduksi wacana. Wacana pada dasarnya "menyatukan" bahasa dengan praktik. Wacana mengacu pada produksi pengetahuan melalui bahasa yang memberi makna pada benda-benda material dan praktik-praktik sosial. Wacana juga dipahami sebagai penjelasan, pendefinisian, pengklasifikasian, dan sistem-sistem abstrak pemikiran. Wacana menyediakan kita cara-cara memperbincangkan sesuatu topik tertentu, baik bertautan dengan ide, praktik-praktik, maupun bentuk-bentuk pengetahuan yang diulang-ulang di beberapa wilayah aktivitas.

Kemudian, bagaimana isu agama dimunculkan? Kontestasi antara kelompok-kelompok yang disebutkan dalam analisis di atas memunculkan agama sebagai sebuah identitas. Penulis

melihat agama dimunculkan dalam bentuk simbol-simbol yang telah dikenal (recognized) sehingga wacana yang dibangun tentang terorisme dan pelakunya, tidak hanya memunculkan tindakan-tindakan (kekerasan) yang dimunculkan tetapi juga segala atribut yang dikenakan oleh individu-individu tersebut. Perhatian dalam kajian ini bukan pada ritual yang dilakukan oleh para pemilik agama tetapi kepada analisis atas sistem makna-makna yang terkandung di dalam simbol-simbol yang meliputi agama tertentu, dan mengaitkan sistem-sistem ini pada struktur-struktur sosial dan proses-proses psikologis.

Kekuasaan tidak lagi berada di tangan para pemimpin agama seperti yang muncul pada kajian-kajian terdahulu tetapi juga ditemukan pada individu penganut agama tertentu. Dalam konteks pemboman di Bali (tahun 2004) dan beberapa daerah lainnya beberapa tahun belakangan, muncul individu-individu yang melakukan bunuh diri dengan membom dirinya sendiri. Tindakan ini jelas bukan tanpa tujuan dan kepentingan. Namun terlihat bahwa kekuasaan juga bertautan dengan pengetahuan, sebab manusia ketika melakukan interaksi dengan yang lain akan selalu mengkonstruksi, mendekonstruksi, dan merekonstruksi pengetahuannya (Foucault, 2000). Pengetahuan itu berasal dari relasi-relasi kekuasaan yang menandai keberadaan subjek. Dengan demikian, kekuasaan dan pengetahuan merupakan dua sisi yang bekerja dalam proses yang sama.

Oleh karena itu, penulis melihat bahwa kebudayaan, perubahan, dan agama sarat akan isu kekuasaan sebagai praksis dari keberadaan individu-individu yang saling berinteraksi. Kekuasaan dipahami sebagai relasi; sesuatu gambaran jalinan yang tidak tunggal, tidak homogen, dan tidak utuh. Ia justru merupakan jalinan yang kompleks

di antara sejumlah interaksi dan peristiwa dalam praktik-praktik sosial sejumlah pelaku dengan posisi yang menyebar. Lebih lanjut menurut Giddens, bekerjanya kekuasaan dapat dipelajari dari cara para pelaku memproduksi dan mereproduksi struktur sosial melalui interaksi-interaksi di antara mereka. Dari interaksi-interaksi tersebut, menurut Giddens (1979 dan 1984), tidak mungkin terjadi penguasaan total atas pelaku tertentu terhadap pelaku lain, yang tercipta adalah dialektika kontrol (the dialectic of control). Artinya, dalam kekuasaan selalu terlibat relasi otonomi dan ketergantungan, baik pada tataran yang menguasai maupun yang dikuasai, bekerja saling mengontrol.

Bertolak dari adanya para pelaku yang saling mengontrol itulah, menurut Giddens (1984), istilah kekuasaan menjadi berbeda dengan istilah dominasi. Dominasi, lebih mengacu pada skemata asimetri hubungan tataran struktur, terutama mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi). Sedangkan kekuasaan menyangkut kapasitas yang terlibat dalam hubungan sosial pada tataran pelaku (interaksi dan praktik sosial). Dengan kata lain, kekuasaan bekerja tidak dilihat dari otoritas penguasaan akses politik dan ekonomi yang dimiliki oleh salah satu pelaku terhadap pelaku yang lain, namun kekuasaan bekerja dalam praktik-praktik sosial sejumlah pelaku dalam rangka mereproduksi dua struktur dominasi (politik dan ekonomi) di atas.

Isu terorisme kemudian tidak terlepas dari isu-isu politik dan ekonomi yang menjadi kepentingan aktor-aktor di belakangnya. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa telah terjadi 'komoditisasi' agama demi tujuan-tujuan tertentu. Agama tidak lagi sekedar perasaan-perasaan atau sentimen-sentimen yang dipelihara melalui ritual-ritual yang dilaksanakan secara terus-menerus tetapi telah mengalami proses pemaknaan

yang begitu rumit sehingga mampu memberikan justifikasi atas tindakan yang dilakukan. Proses tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang sebagai hasil 'interaksi' manusia/individu dengan lingkungan sosial-budaya di mana ia hidup. Proses itu menjadi semakin kompleks ketika individu-individu (kelompok) yang memiliki kepentingan dan tujuan tertentu berhadapan dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda kepentingan dan tujuan. Di sinilah terjadi upaya memodifikasi kebudayaan melalui konstruksi, rekonstruksi, atau dekonstruksi pengetahuan.

Penutup

Pemikiran-pemikiran terdahulu para antropolog yang menghasilkan teori-teori kebudayaan yang statis, tetap, dan bounded akan sulit menjelaskan fenomena-fenomena yang menjadi hasil dari dinamika kehidupan masyarakat yang berinteraksi dengan masyarakat-masyarakat lain, baik dalam lingkup nasional, internasional, ataupun global. Kebudayaan yang dianggap homogen dan lestari sepanjang masa juga mendapat banyak revisi dari pelbagai pihak. Antropolog kemudian merekonstruksi atau mendekonstruksi pemikiran-pemikirannya dengan meminjam pemikiran-pemikiran dari disiplin-disiplin ilmu yang lain sehingga menghasilkan teori-teori kebudayaan yang banyak digunakan dalam ruang-

ruang diskusi para akademisi masa kini.

Dalam evaluasi singkat ini pula, penulis ingin menyampaikan bahwa isu-isu kekuasaan tidak lagi didominasi oleh disiplin ilmu politik tetapi juga menjadi sangat menarik dan bermanfaat ketika 'dipertemukan' dengan isu-isu kebudayaan yang menjadi fokus kajian antropologi. Kebudayaan yang di dalamnya juga membahas interaksi manusia dan lingkungannya (baik sosial, ekonomi, politik, maupun budaya) menjadi sangat kompleks karena senantiasa mengalami perbaikan atau modifikasi sebagai wujud dari perubahan yang dialaminya.

Dengan demikian, kebudayaan menjadi satu konsep yang semakin menarik dibahas ketika dihubungkan dengan isu-isu lain seperti perubahan dan agama. Dengan mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat sehari-hari, keterkaitan antara ketiganya semakin jelas terlihat. Sementara isu kekuasaan yang menjadi fokus kajian dalam perkuliahan ini, juga mewarnai analisis fenomena yang diamati. Perspektif ini memberikan pandangan dan wawasan yang berbeda dengan disiplin ilmu politik yang menempatkan kekuasaan pada struktur sosial yang ada di masyarakat. Sehingga dalam penelitiannya, seorang antropolog dapat lebih memahami makna dari fenomena yang ditelitinya dengan cara menguak 'hidden transcript' yang tersembunyi di balik fenomena tersebut.

Referensi

- Boggs, James P., 2004, *The Culture Concept as Theory, in Context*. CURRENT ANTHROPOLOGY, 45(2): 187-209.
- Foucault, Michel. 2000, *Power*, Penguin Book Ltd, London.
- Foucault, Michel. 1980, *Power / Knowledge: Selected Interview & Other Writing*, Pantheon, New York.

- Foucault, Michel. 1977, *Discipline and Punish*, Penguin Book Ltd, London.
- Geertz, Clifford. 1977, *Religion as a Cultural Sistem dalam Interpretation of Cultures*, Basic Books, New York.
- Geertz, Clifford. 1973, *The Impact of the Concept of Culture on the Concept of Man dalam The Interpretation of Cultures*, Basic Books, New York.
- Geertz, Clifford. 1973, *Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture dalam The Interpretation of Culture*, Basic Books, New York.
- Giddens, Anthony. 1984, *Constitution of Society: The Outline of the Theory of Structuration*, Polity Press, Cambridge.
- Giddens, Anthony. 1979, *Central Problems in Social Theory*, Macmillan, London.
- Goodenough, Ward H. 1994, *Toward a Working Theory of Culture dalam Assessing Cultural Anthropology*, Robert Borofsky, ed., McGraw-Hill, Inc, New York.
- Keessing, Roger M. 1994, *Theories of Culture Revisited dalam Assessing Cultural Anthropology*, Robert Borofsky, ed., McGraw-Hill, New York.
- Li, Tania Murray. 2007, *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*, Duke University Press, London.
- Nurhadi, Robi, 2003, *Politik Teror: Resistensi Konflik Peradaban?*. <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=63>., diakses tanggal 3 Juni 2011.
- Turner, Victor. 1987, *Planes of Classification in a Ritual of Life and Death dalam The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*, Cornell UP, New York.